

Konstruksi Orientasi Politik Siswa SMA di Kabupaten Sleman

Mirza Hardian¹

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
mirza.hardian@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Family and school are the agents of political socialization that play a major role in shaping the political orientation of students. Both of them have enormous control because most of the process in transmitting information about politics takes place in the family and school environment which has an impact on the formation of political orientation. This study aims to determine the role of families and schools in the formation of students' political orientation in Sleman Regency. The approach to this research is quantitative with a survey method to the 307 people who were randomly selected as sample of this research. The result show that the role of family and school was still low. In this case, the role of the family in the formation of political orientation by 31%, while the role of the school made an effective contribution of 5.3%.

Keywords: family, school, political orientation

I. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjadi dasar pijakan untuk mengelola pemerintahan di sebagian negara setelah perang dunia kedua. Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi simbol dari sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan dengan menggunakan konsep demokrasi pada dasarnya membutuhkan keterlibatan setiap warga negara untuk menciptakan sistem pemerintah yang baik. Keterlibatan warga negara pada penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu bentuk indikator untuk mengukur efektifitas pelaksanaan sistem demokrasi di sebuah negara. Keterlibatan warga negara di ruang publik tidak dapat tercipta secara sporadis yang bersifat reaktif terhadap isu-isu publik tertentu, melainkan harus diiringi dengan penguasaan terhadap civic competence.

Civic competence merupakan syarat mutlak setiap warga negara untuk berperan secara aktif dan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintah. Konsep

civic competence yang dikemukakan oleh Hoskin (2013) memberikan penekanan terhadap aspek knowledge, skill, values dan attitudes dalam konteks sosial politik dan ekonomi pada warga negara yang berperan sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintah, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap orientasi politik setiap warga negara. Oleh sebab itu, di negara yang menganut sistem demokrasi, civic competence sangat berperan sebagai human capital untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap seluruh warga negara.

Indonesia sebagai negara yang menggunakan konsep demokrasi pada sistem pemerintahan juga membutuhkan partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara di Indonesia dapat diidentifikasi lebih mendekati pada model keterlibatan warga negara tipe liberal dengan ciri-ciri keterlibatan warga negara pada aspek politik termasuk berpartisipasi pada pemilihan umum



yang merupakan hak dari setiap warga negara (Hoskin, 2013). Partisipasi politik warga negara di Indonesia pada skala besar lazimnya terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan pemilihan umum kepala daerah.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk konsekuensi model sistem pemerintahan Indonesia yang bertingkat. Perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang dilakukan secara serentak merupakan reformasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Reformasi yang diusung pada pemilihan umum kepala daerah hanya menyentuh aspek waktu penyelenggaraan, sehingga asas demokrasi liberal dengan konsep one man one vote masih kekal dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Pada konteks Indonesia, konsep one man one vote akan menimbulkan masalah baru yaitu timbulnya tindakan golput sebagai perilaku politik yang lazimnya terjadi, sebab berpartisipasi pada pemilihan umum kepala daerah merupakan hak warga negara dan bukan sebagai sebuah kewajiban dari warga negara.

Hasil penelitian dari Hart & Atkins (2002) memberikan gambaran bahwa perilaku politik (golput) pada orang dewasa terutama orang tua akan memberikan pengaruh yang sama pada anak. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa hubungan orangtua dan anak akan berbanding lurus,

sehingga akan menimbulkan sikap apolitis yang cukup tinggi pada masa yang akan datang. Hasil penelitian Hart & Atkins (2002) yang diperkuat oleh teori personal working model dari Kuczynsky & Parkin (2007) yang mengemukakan bahwa proses transmisi nilai, keyakinan dan sikap orang tua dalam konteks sosialisasi politik secara berkelanjutan akan mengalami perkembangan dan rekonstruksi, sehingga perilaku politik orang tua akan diadopsi oleh anak sebagai proses imitasi dari hubungan diantara keduanya.

Keluarga sebagai unit terkecil dari struktur sosial masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang disebut Berns (2011) sebagai keluarga inti memiliki peran penting untuk mengenalkan sistem nilai yang diyakini kebenarannya kepada anak. Hubungan timbal balik antara perkembangan anak di lingkungan keluarga juga dapat dijelaskan melalui model ecological system yang digunakan untuk melakukan identifikasi peran keluarga terhadap pembentukan orientasi politik anak melalui indikator microsystem, mesosystem, exosystem dan macrosystem (Warren & Wicks, 2011). Model ecological system menggunakan pendekatan berbasis lingkungan terhadap perkembangan anak yang diawali dari skala mikro kearah makro melalui proses sosialisasi politik. Model ini juga mampu menjadi salah satu instrumen untuk melakukan prediksi terhadap keterlibatan anak pada masa depan melalui identifikasi pola sosialisasi politik di lingkungan sosial domisili anak.

Pengaruh Microsystem merupakan indikator dari model



ecological system dengan skala mikro yang menjadi lingkungan terdekat dari anak, sehingga terjadi hubungan interaksi secara langsung dengan anak. Hubungan ini dapat mencakup berbagai lingkungan sosial termasuk keluarga, sekolah, dan media informasi (Warren & Wicks, 2011). Interaksi yang intens pada anak, terutama antara orang tua dan anak pada proses transmisi nilai-nilai yang dianggap benar dan diyakini oleh orang tua melalui komunikasi merupakan faktor dominan yang akan diserap oleh anak sebagai sesuatu keyakinan yang sama.

Pola komunikasi terjadi antara orang tua dan anak pada umumnya akan berlangsung secara vertikal. Pola ini pada dasarnya tidak selalu menjadi pola yang mutlak terjadi diantara keduanya, sebab Kuczynsky & Parkin (2007) berpendapat bahwa hubungan diantara orang tua dan anak akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga dapat membentuk pola komunikasi horizontal antara orang tua dan anak. Pola komunikasi secara horizontal merupakan salah satu bentuk pola komunikasi yang mampu mengembangkan kemampuan kognitif, terutama yang berhubungan dengan pengalaman sosial pada anak (Gauvain & Perez, 2007).

Hasil penelitian dari McIntosh, Hart, & Youniss (2007) menunjukkan bahwa diskusi sebagai pola komunikasi dua arah memberikan kontribusi yang positif terhadap pengetahuan dan pemahaman pada anak, terutama pada konteks politik. Penjelasan terkait

penelitian ini disebabkan oleh adanya proses transmisi nilai atau keyakinan yang dianggap baik dan benar oleh orang tua memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan psikologi anak. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh (Warren & Wicks, 2011) bahwa anak akan mampu mengadoopsi nilai-nilai yang diyakini oleh orang tuanya, termasuk dalam konteks politik. Oleh sebab itu, hubungan antara orang tua dan anak relatif memiliki kesamaan yang disebabkan oleh proses imitasi sikap politik yang dilakukan anak pada lingkungan keluarga.

Media informasi yang tersedia di lingkungan keluarga juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak. Ketersediaan akses media informasi akan mendukung untuk meningkatkan kesadaran sosial pada anak. Ketersediaan akses informasi politik yang baik di lingkungan keluarga juga mampu mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan kapasitas pada anak yang berkontribusi untuk membentuk sikap politik (Lee et al., 2013), sehingga menjadi pengalaman sosial yang berperan untuk perkembangan kognitif (Gauvain & Perez, 2007) yang akan membentuk pola pikir pada anak.

Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku dan pola berpikir pada anak. Mesosystem sebagai tahapan lanjutan dari microsystem merupakan tahapan untuk melakukan identifikasi perkembangan pada anak yang terpusat pada pengalaman anak dalam proses interaksi di lingkungan (Warren & Wicks, 2011). Pada tahap ini, pengalaman yang



didapatkan oleh anak melalui lingkungan keluarga berupa pola komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak memberikan peluang untuk anak melakukan proses adaptasi dan imitasi dari pengalaman anak di lingkungan keluarga dengan lingkungan sosial. Pendapat ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian McIntosh, Hart, dan Youniss (2007) yang menerangkan dua temuan penting yaitu (1) interaksi antara orang tua dan anak dalam bentuk diskusi dengan tema politik akan memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan politik pada anak, dan (2) pengaruh tersebut akan ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh orang tua seperti pengetahuan orang tua, latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi.

Pengaruh exosystem sebagai indikator ketiga dari model ecological system merupakan pengaruh dari tahapan perkembangan anak yang ditinjau dari gaya hidup atau kebiasaan orang tua di lingkungan keluarga. Pendapat Hart & Atkins (2002) adanya hubungan timbal balik pada gaya hidup orang tua terhadap anak, terutama pada tingkat civic knowledge diantara keduanya yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua. Gaya hidup yang termasuk dalam kategori ini adalah tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, tempat sekolah dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat menunjang perkembangan intelektual. Oleh sebab itu, gaya hidup orang tua akan berbanding lurus dengan gaya hidup anak yang disebabkan oleh adanya pengaruh interaksi yang intens antara orang tua dan anak.

Macrosystem sebagai indikator terakhir dari model ecological system memberikan penekanan pada aspek kebiasaan pada perkembangan anak. faktor-faktor yang berperan dalam menentukan perkembangan pada anak yaitu pendidikan, ras atau suku, dan agama (Warren & Wicks, 2011). Pada pengaruh macrosystem budaya yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan dari lingkungan keluarga dalam proses perkembangan anak, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang di ada di lingkungan keluarga menjadi nilai-nilai yang diinternalisasikan pada anak baik secara sadar ataupun tidak.

Keluarga sebagai agen sosialisasi politik yang mempunyai peranan penting dalam melakukan proses pembentukan orientasi politik terhadap anak. Anak sebagai bagian dari keluarga akan mendapatkan pengetahuan dan informasi pertama kali mengenai konsep politik melalui orang tua (McIntosh et al., 2007). Pendapat yang sama dari Hart & Atkins (2002) mengemukakan bahwa pengaruh orang tua dengan pendidikan yang baik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan civic competence, sehingga proses transfer informasi didalam lingkungan keluarga oleh orang tua menjadi faktor yang menentukan perkembangan pola pikir anak-anak pada politik. Oleh sebab itu, pada umumnya, anak mempunyai konsep yang sama dengan orang tua dalam memaknai politik, sehingga akan membentuk orientasi politik pada anak akan terbentuk secara alamiah.

Sekolah sebagai institusi pendidikan resmi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

berfungsi sebagai media untuk pemenuhan kompetensi warga negara. Sekolah juga berperan untuk menyediakan pengalaman intelektual dan sosial yang dapat mengembangkan kemampuan individu dengan tujuan beradaptasi dengan lingkungan sosial (Berns, 2011). Sekolah sebagai agen sosialisasi politik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran untuk melaksanakan pendidikan politik untuk siswa dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara demokratis yang berorientasi pada (1) pembentukan kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) membentuk warga negara Indonesia yang aktif, kritis dan demokratis, serta (3) pengembangan kultur demokrasi dengan asas kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik harus berorientasi pada pengembangan civic competence siswa yang terdiri dari komponen civic knowledge, civic skill dan civic disposition (Branson, 1999). Civic competence dalam konteks negara yang menganut paham demokrasi berperan untuk mereduksi perilaku apolitis dan memberikan rangsangan kepada siswa untuk menjadi warga negara aktif yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kontrol sosial dan terlibat pada aktifitas publik. civic competence sebagai output dari pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat membentuk

pembentukan orientasi politik pada siswa sebagai warga negara Indonesia. Disisi lain, civic competence sebagai output dari proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh peran guru pada proses belajar mengajar dikelas. Oleh sebab itu, peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang mengkolaborasi fenomena-fenomena sosial politik di Indonesia pada proses pembelajaran di kelas melalui skema pembelajaran secara interaktif (Sigauke, 2013).

II. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada SMA Negeri di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Jumlah sampel sebesar 307 orang dengan taraf signifikansi sebesar 5 %. Data penelitian diperoleh melalui kuisioner yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi.

III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur besarnya pengaruh peran keluarga dan peran sekolah secara bersama terhadap pembentukan orientasi politik siswa SMA Negeri di kabupaten Sleman maka digunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda disajikan melalui tabel berikut.

Variabel	Fhitung	Ftabel	Sig	R Square
X1 dan X2 terhadap Y	86,259	3,02	0,00	0,363

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Ganda

Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai signifikansi secara bersama sama antara variabel keluarga (X1) dan variabel sekolah (X2) sebesar 0,000 dengan nilai F hitung sebesar 86,259 dengan t tabel sebesar 3,082. Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa besaran nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($86,259 > 3,02$), hasil ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada pengaruh keluarga dan sekolah secara bersama-sama terhadap pembentukan orientasi politik.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai R square sebesar 0,363. Nilai R Square memberikan makna bahwa kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 36,3%. Rincian pengaruh untuk setiap variabel bebas dapat dilihat pada tabel berikut.

Variabel	Kontribusi	
	Efektif	Relatif
Peran Keluarga	31,0%	85,4 %
Peran Sekolah	5,3%	14,6 %
Total	36,3%	100 %

Tabel 2. Perhitungan Sumbangan Efektif Dan Relatif

IV. PEMBAHASAN

Hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga dan peran sekolah memberikan pengaruh yang sangat rendah terhadap pembentukan orientasi politik siswa di Kabupaten Sleman. Peran sekolah memberikan pengaruh sebesar 5,3% terhadap pembentukan orientasi politik siswa SMA di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai agen sosialisasi politik belum mampu melakukan proses transmisi nilai-nilai politik secara maksimal. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan politik di lingkungan sekolah belum mampu membentuk civic competence yang berperan dalam pembentukan orientasi politik pada siswa yang ditunjukkan melalui persentase indikator civic competence pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Sleman masih sangat rendah.

Kondisi demikian merupakan salah satu bentuk kelemahan dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia yang menggunakan pendekatan minimalis dengan berorientasi pada aspek pengetahuan yang didominasi oleh peran guru dalam proses pembelajaran (Winataputra, 2016). Kondisi demikian dapat menjelaskan mengenai fenomena lemahnya civic competence pada siswa. Padahal dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sekolah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa sebagai warga negeri muda untuk mempunyai peran secara maksimal di abad 21 seperti ; (1)



kemampuan untuk menganalisis masalah sebagai anggota komunitas global, (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan bertanggungjawab atas peran di masyarakat, (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis, (5) kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, (6) kemampuan melindungi lingkungan dari kebiasaan konsumtif, (7) kemampuan melindungi hak asasi manusia, dan (8) kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasional (Jayadiputra et al., 2020). Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran PPKn harus berorientasi pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses pembelajaran yang mengacu pada peningkatan kompetensi abad 21.

Hasil pengolahan data peran keluarga pada indikator microsystem berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah siswa sebesar 42,3%) kategori tinggi sebesar 27,0%, kategori rendah sebesar 19,9% dan sebesar 10,7% pada kategori sangat rendah. Persentase indikator pada indikator microsystem menunjukkan pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Data ini bermakna bahwa transfer informasi orang tua dan anak serta peran media informasi yang disediakan di lingkungan keluarga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transmisi informasi tentang pemilihan umum

Hasil pengolahan data pada indikator mesosystem secara keseluruhan didominasi pada kategori sangat rendah dengan persentase 67,1%, kategori rendah dengan jumlah 16,9%, sedangkan pada kategori tinggi 14,3% dan 1,6% pada kategori sangat tinggi.

Kategorisasi pada indikator mesosystem menunjukkan pengalaman siswa SMA Negeri di Kabupaten Sleman pada lingkungan keluarga sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas diskusi tentang isu sosial yang sedang berkembang terutama mengenai pemilihan umum sangat minim antara orang tua dan anak.

Indikator exosystem pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaruh life style orang tua. data penelitian ini menunjukkan bahwa kategorisasi pada indikator exosystem didominasi pada kategori sangat rendah dengan jumlah 75,2%, kategori rendah sebesar 23,8%, sedangkan kategori tinggi 6,2% dan sebesar 2,9% pada kategori sangat tinggi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa aktifitas orang tua dalam konteks ini adalah pekerjaan orang tua tidak memberikan dampak yang positif terhadap pembentukan orientasi politik siswa pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sleman

Macrosystem sebagai indikator dari variabel keluarga pada penelitian ini menunjukkan pada kategori sangat rendah dengan jumlah 67,1% dan sebesar 23,8% pada kategori rendah, disisi lain pada kategori tinggi sebesar 6,2%, dan (2,9%) pada kategori sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua, faktor kesukuan dan faktor agama tidak memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan orientasi politik

Keluarga sebagai lingkungan primer terjadinya proses transmisi informasi mengenai politik memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap siswa. Hubungan yang terjadi



antara peran keluarga sebagai stimulus pembentukan orientasi politik pada siswa bersifat kausalitas, sebab interaksi antara orang tua dan anak dalam lingkungan keluarga seperti diskusi politik, tingkat sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua akan selalu berbanding lurus terhadap pemahaman mengenai politik McIntosh, Hart & Younis (2007).

Hasil penelitian Pancer (2015) memberikan penjelasan bahwa hubungan orang tua dan anak melalui diskusi tentang berbagai isu memberikan efek positif terhadap perilaku anak, sehingga hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak terjadi hubungan yang selalu berbanding lurus diantara keduanya. Penelitian ini memberikan petunjuk bahwa orang tua merupakan faktor penting untuk membentuk keyakinan dan cara pandang anak terhadap sesuatu objek tertentu. Pada konteks politik hubungan antara orang tua dan anak dalam bentuk interaksi dan komunikasi yang intens dalam bentuk diskusi mengenai politik dapat memberikan cara pandang yang sama terhadap politik, sebab menurut Urbatsch (2014) penyampaian pesan politik pada anak melalui orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan orientasi politik.

Proses transmisi politik dari orang tua kepada anak merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan sebagai bagian dari proses pembentukan orientasi politik. Mesosystem sebagai indikator untuk mengukur pengalaman siswa di lingkungan keluarga pada proses pembentukan orientasi politik menunjukkan hasil yang rendah 67,1%.

Presentase mesosystem yang rendah menunjukkan bahwa peran orang tua dalam political literacy terhadap anak belum mencapai hasil yang signifikan. Keadaan seperti ini juga dapat dipengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di Kabupaten Sleman dengan index gini sebesar 0,42 dan faktor tingkat pengetahuan terhadap politik yang masih rendah. Hasil penelitian dari McIntoch, Hart dan Younis (2007) menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan politik yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi pada orang tua akan berbanding lurus terhadap tingkat pengetahuan politik pada anak yang disebabkan adanya transfer informasi dan pengetahuan politik melalui diskusi ataupun komunikasi yang berhubungan dengan politik.

Pada konteks keluarga, media massa juga memberikan ketersediaan informasi yang dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan melakukan analisis terhadap setiap informasi yang diterima oleh anak. Peran media massa berdasarkan hasil penelitian dari Moeller & De Vreese (2013) menunjukkan bahwa media massa sebagai agen sosialisasi politik tidak memberikan peran yang cukup signifikan terhadap anak, melainkan mempunyai peran yang signifikan terhadap orang dewasa. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa pada rentang usia remaja membutuhkan penerjemah pesan-pesan politik yang disampaikan melalui media massa, dalam hal ini adalah orang tua. Fenomena ini sebagian besar sangat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian berpikir oleh anak sebagai



akibat dari lemahnya civic competence anak untuk melakukan analisis terhadap fenomena sosial politik yang terjadi di lingkungan mereka.

Kemandirian berpikir siswa melakukan analisis dan menerjemahkan pesan-pesan politik melalui media massa sebagai bagian dari civic competence. Persentase civic competence pada siswa di Kabupaten Sleman didominasi pada kriteria rendah 38,8% dan kriteria sangat rendah 24,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa di Kabupaten Sleman belum dapat melakukan analisis terhadap panyampaian pesan-pesan politik melalui media massa pada pemilihan umum, sehingga memberikan gambaran bahwa orang tua mempunyai pengaruh politik yang sangat kuat untuk membentuk orientasi politik pada anak.

Exosystem dan macrosystem sebagai indikator untuk mengukur peran keluarga pada pembentukan orientasi politik pada anak menunjukkan hasil yang sangat rendah yaitu 75,2% pada exosystem dan 67,1% pada macrosystem. Presentase pada indikator exosytem menunjukkan bahwa profesi orang tua dan tingkat pendidikan orang tua di Kabupaten Sleman tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan orientasi politik pada siswa.

Persentase pada indikator macrosystem menunjukkan bahwa faktor kesukuan dan kepercayaan yang diyakini oleh orang tua tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan orientasi politik anak. Hasil temuan penelitian ini dapat diperkuat oleh pendapat Urbatsch (2014)

yang menyatakan bahwa anak dapat mempunyai cara pandang politik yang berbeda dari orang tua, sebab hubungan orang tua dan anak tidak selalu dapat dipastikan memiliki pandangan yang sama terhadap politik.

V. KESIMPULAN

Keluarga dan sekolah sebagai agen sosialisasi politik seharusnya mempunyai peran yang cukup signifikan dalam proses terbentuknya orientasi politik pada siswa pada jenjang SMA. Kondisi demikian disebabkan porsi waktu setiap hari sebagian besar terjadi pada kedua lingkungan ini. Disisi lain peran sekolah melalui pembelajaran PPKn harus mengacu pada penguasaan aspek civic competence yang berperan untuk mempersiapkan siswa sebagai warga negara muda untuk menjalankan peran sebagai warga negara Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Berns, R. M. (2011). Family, School, Community: In Giants Among Us (9th ed.). Cengage Learning. <https://doi.org/10.2307/j.ctv16h2nct.10>
- Gauvain, M & Perez, S M. (2007). The Socialization of Cognition. Dalam J.E Grusec & P.D Hastings (Ed.), Handbook of Socialization. New York : The Guilford.
- Hart, D., & Atkins, R. (2002). Civic competence in Urban youth. Applied Developmental Science, 6(4), 227-236.



- https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0604_10
- Hoskin, B. (2012). What Does Democracy Need Fromo Its Citizens ? Dalam Murray Print & Dirk Lange (Ed.), Civic Education and Competences for Engaging Citizen In Democracies. Rotterdam : Sense Publisher.
- Jayadiputra, E., Sapriya, Karim, A. A., & Rahmat. (2020). 21st Century Competences in Civic Education Curriculum of Indonesia. 418(Acec 2019), 99–102. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.019>
- Kuczynsky, L & Parkin, C M, (2007). Agency and Biddirectional in Socialization : INteractions, Transactions, and Relational Dialectics. Dalam J.E Grusec & P.D Hastings (Ed.), Handbook of Socialization. New York : The Guilford.
- Lee, N. J., Shah, D. V., & McLeod, J. M. (2013). Processes of Political Socialization: A Communication Mediation Approach to Youth Civic Engagement. *Communication Research*, 40(5), 669–697. <https://doi.org/10.1177/0093650212436712>
- McIntosh, H., Hart, D., & Youniss, J. (2007). The influence of family political discussion on youth civic development: Which parent qualities matter? *PS - Political Science and Politics*, 40(3), 495–499. <https://doi.org/10.1017/S1049096507070758>
- Moeller, J., & de Vreese, C. (2013). The differential role of the media as an agent of political socialization in Europe. *European Journal of Communication*, 28(3), 309–325. <https://doi.org/10.1177/0267323113482447>
- Pancer, S. M. (2015). *The Psychology oof citizenship and civic engagement*. Oxford University Press.
- Sigauke, A. T. (2013). Citizenship education in the social science subjects: An analysis of the teacher education curriculum for secondary schools. *Australian Journal of Teacher Education*, 38(11), 125–139. <https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n11.1>
- Ubaedillah dan Rozak, A. (2014). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Media Group.
- Urbatsch, R. (2014). Families Values: how Parents, Siblings, And Children Affect POLitical Attitudes. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Warren, R., & Wicks, R. H. (2011). Political Socialization : Modeling Teen Political and Civic Engagement. *Journalism & Communication Quarterly*, 88(8), 156–175.
- Winataputra, U. S. (2016). *Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran*



Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) dalam
Konteks Sistem Pendidikan
Nasional. Jurnal Moral

Kemasyarakatan, 1(1), 15–36.
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184>

